



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 200.1/233/BKPol-PS/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025 – 2029

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025 – 2029, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029, dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

- 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:

1. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 8 September 2025

KEPALA BADAN,



CESTROJONI, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NP. 19691106 199603 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 200.1/233/BKPol-PS/2025
Tanggal : 8 September 2025
Tentang : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025 – 2029

No.	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target					Sumber data dan Penanggung Jawab
							2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Terwujudnya Tata Kelola Badan Kesbangpol yang Efisien dan Berkinerja Tinggi untuk Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	1. Indeks Harmoni Indonesia	1. Meningkatnya Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	A (82)	A (82.15)	A (82,30)	A (82,40)	A (82,50)	Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.		2. Persentase Capaian Kinerja Badan Kesbangpol	2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Inovasi SIUCuP (Sistem Usulan Cuti Pegawai) Setelah dilakukan Penginputan Eviden di Aplikasi <i>Innovative Government Award</i> (IGA)	Angka	92	93	94	95	96	Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.			3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Partisipan Tahun Ini - Jumlah Partisipan Tahun Lalu X Jumlah Partisipan Tahun Lalu	%	0.5	0.7	0.8	0.9	1	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

4.			4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi	Persentase Peningkatan Kegiatan Pendidikan Politik	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik Tahun Ini - Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik Tahun Sebelumnya X 100 %	%	0.6	0.7	0.8	0.9	1	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
				Persentase Peningkatan Ormas yang Sesuai dengan Regulasi	Jumlah Ormas Sesuai Regulasi Tahun Ini – Jumlah Ormas Sesuai Regulasi Tahun Sebelumnya X 100 %							Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
5.			5. Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	Jumlah Konflik Ekososbud yang diselesaikan Secara Damai X 100 % Jumlah Total Konflik Ekososbud	%	100	100	100	100	100	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

II. Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029

TUJUAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya Tata Kelola Badan Kesbangpol yang Efisien dan Berkinerja Tinggi untuk Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Persentase Capaian Kinerja Badan Kesbangpol	%	95	96	97	98	100
		Indeks Harmoni Indonesia	Angka	6	6,1	6,3	6,5	6,7

PEJABAT : ESSELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	A (82)	A (82.15)	A (82,30)	A (82,40)	A (82,50)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	92	93	94	95	96
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	%	0.5	0.7	0.8	0.9	1
4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi	Persentase Peningkatan Kegiatan Pendidikan Politik	%	0.6	0.7	0.8	0.9	1
		Persentase Peningkatan Ormas yang Sesuai dengan Regulasi	%	0.09	0.1	0.15	0.2	0.25

5.	Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	%	100	100	100	100	100
----	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

PEJABAT : ESSELON III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Nilai Evaluasi Komponen Perencanaan Badan Kesbangpol	Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol	Nilai	25.80	25.82	25.84	25.86	25.88
2.	Meningkatnya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawaian	%	89	91	93	95	97
3.	Meningkatnya Inovasi	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	1	1	1
4.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	40	45	50	55	60
5.	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	%	66.67	66.67	100	100	100
6.	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	59	60	61	62	63

7.	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	49	50	51	52	53
8.	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	%	60	70	80	90	100

KINERJA OPERASIONAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2026	2027	2028	2029	2030
1.	Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	7 (Renstra, RKA, RKA Perubahan, Renja, Renja Perubahan, LKj dan LKPj)	6 (RKA, RKA Perubahan, Renja, Renja Perubahan, LKj dan LKPj)	6 (RKA, RKA Perubahan, Renja, Renja Perubahan, LKj dan LKPj)	6 (RKA, RKA Perubahan, Renja, Renja Perubahan, LKj dan LKPj)	7 (Renstra, RKA, RKA Perubahan, Renja, Renja Perubahan, LKj dan LKPj)
2.	Meningkatnya Kualitas Data Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola	Dokumen	4	4	5	5	6
3.	Meningkatnya Layanan Kepegawaian	Persentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya Penilaian Kearsipan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Kearsipan Perangkat Daerah	Angka	43,55 (C)	45,00 (C)	48,00 (C)	52,48 (CC)	55,00 (CC)
5.	Meningkatnya SDM Kesbangpol	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri	Kali	1	1	1	1	1

6.	Meningkatnya Teknologi Informasi	Jumlah Teknologi Informasi yang digunakan	Teknologi	1	1	1	1	1
7.	Meningkatnya Masyarakat yang Mengikuti Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Orang	5000	5000	5000	5000	5000
8.	Meningkatnya Koordinasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Koordinasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kali	1	1	1	1	1
9.	Meningkatnya Fasilitas Pencegahan dan Pengawasan PEKAT	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat	Kali	1	1	1	1	1
10.	Meningkatnya Koordinasi Ketahanan Ekososbud dan Agama	Jumlah Koordinasi Ketahanan Ekososbud dan Agama	Kali	1	1	1	1	1
11.	Terlaksananya Penyaluran Dana Hibah Partai Politik yang Sesuai dengan Regulasi	Jumlah Berkas Persyaratan Pencairan Dana Hibah Partai Politik yang Sesuai dengan Regulasi	Dokumen	11	11	11	11	11
12.	Meningkatnya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik	Kali	1	1	1	1	1
13.	Meningkatnya Jumlah Ormas yang Sesuai dengan Regulasi	Jumlah Ormas yang Mendaftar yang Sesuai dengan Regulasi	Ormas	5	6	7	8	9
14.	Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Ormas	Jumlah Laporan Ormas	Laporan	4	4	4	4	4

15.	Terlaksananya Penyediaan Informasi Konflik	Jumlah Data Konflik	Dokumen	4	4	4	4	4
16.	Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Konflik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Konflik	Dokumen	4	4	4	4	4

III. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029

Agar seluruh stakeholder Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki presepsi yang sama terhadap IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formula	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber Data	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Nilai kematangan inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri.
Formula	: Nilai Kematangan Inovasi SIUCuP (Sistem Usulan Cuti Pegawai) Setelah dilakukan Penginputan Eviden di Aplikasi <i>Innovative Government Award</i> (IGA)
Sumber Data	: Aplikasi <i>Innovative Government Award</i> (IGA)
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar perubahan (kenaikan) jumlah atau tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan, program, atau aktivitas yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai ideologi negara (Pancasila) dan wawasan kebangsaan dalam periode waktu tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Partisipan Tahun Ini} - \text{Jumlah Partisipan Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Partisipan Tahun Lalu}} \times 100\%$
Sumber Data	: Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Persentase Peningkatan Kegiatan Pendidikan Politik

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Pengukuran yang menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah atau intensitas kegiatan pendidikan politik dari periode sebelumnya ke periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik Tahun Ini} - \text{Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik Tahun Sebelumnya}}{\text{Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$
Sumber Data	: Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5. Persentase Peningkatan Ormas yang Sesuai dengan Regulasi

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Pengukuran yang menunjukkan proporsi atau persentase dari jumlah Ormas yang mengalami peningkatan, yang memenuhi

dan sesuai dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku.

Formula	:	$\frac{\text{Jumlah Ormas Sesuai Regulasi Tahun Ini} - \text{Jumlah Ormas Sesuai Regulasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Jumlah Ormas Sesuai Regulasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6. Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik

Level dalam Resntra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	:	Pengukuran ini menunjukkan sejauh mana kegiatan pencegahan konflik dilakukan secara luas dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai wilayah, kelompok, atau aspek masyarakat secara dini, guna mencegah terjadinya konflik yang lebih besar.
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah Konflik Ekososbud yang diselesaikan Secara Damai}}{\text{Jumlah Total Konflik Ekososbud}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

7. Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol

Level dalam Resntra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	:	Peningkatan dalam kualitas dan efektivitas penilaian terhadap komponen perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol sesuai dengan penilaian yang dikeluarkan oleh Inspektorat
Formula	:	Nilai yang dikeluarkan oleh Inspektorat
Sumber Data	:	Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawaian

Level dalam Resntra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	:	Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian diukur melalui persepsi

	responden terhadap berbagai aspek pelayanan kepegawaian
Formula	: Tingkat perhitungan rata-rata kepuasan terhadap layanan kepegawaian
Sumber Data	: Bagian Umum Kepegawaian
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

9. Jumlah Inovasi

Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Inovasi yang dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Formula	: Jumlah Inovasi
Sumber Data	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

10. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan diukur melalui tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku individu terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun profesional
Formula	: Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Total Target Peserta X 100%
Sumber Data	: Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

11. Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan

Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Tingkat keberhasilan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan kebijakan/ program/ kegiatan yang telah ditetapkan

dalam rangka menjaga dan meningkatkan:
1) Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya daerah; 2) Pencegahan penyalahgunaan Narkotika; dan 3) Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan di daerah.

Formula	:	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Total Kebijakan yang direncanakan}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

12. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik

Level dalam Resntra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	:	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik adalah pengukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi kader partai yang telah mengikuti kegiatan atau program pendidikan politik dibandingkan dengan jumlah total kader partai.
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah Peserta Kegiatan Pendidikan Politik yang Telah dilaksanakan oleh Partai Politik}}{\text{Target Jumlah Orang yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan (11 Partai Politik X 15 Kecamatan X 10 Orang = 1650 Orang)}} \times 100\%$
Sumber Data	:	11 (Sebelas) Partai Politik yang Mendudkiki Kursi di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

13. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif

Level dalam Resntra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	:	Perbandingan antara jumlah organisasi kemasyarakatan yang masih melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan pendiriannya terhadap jumlah total organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dalam suatu wilayah pada periode

		tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%).
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah Ormas yang Aktif}}{\text{Jumlah Total Ormas Terdaftar}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

14. Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan

Level dalam Resntra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	:	Perbandingan antara jumlah kasus konflik sosial yang telah berhasil diselesaikan melalui upaya mediasi, fasilitasi, rekonsiliasi, atau tindakan penyelesaian lainnya terhadap jumlah total kasus konflik sosial yang terjadi dalam periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%).
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Total Konflik Sosial yang Terjadi}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

15. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu

Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Jumlah dokumen perencanaan dan/atau penganggaran yang disusun oleh perangkat daerah dan disampaikan sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.
Formula	:	Dokumen perencanaan dan/atau penganggaran yang disusun oleh perangkat daerah dan disampaikan sesuai

dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditetapkan

- Sumber Data : Bagian Perencanaan
- Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

16. Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola

- Level dalam Resntra : Kinerja Operasional
- Definisi Oprasional : Jumlah himpunan data sektoral yang telah dikumpulkan, diolah, disimpan, dan/atau dipublikasikan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan tata kelola data sektoral pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.
- Formula : Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola
- Sumber Data : Bagian Perencanaan
- Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

17. Persentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu

- Level dalam Resntra : Kinerja Operasional
- Definisi Oprasional : Perbandingan antara jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan dan/atau diterbitkan sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditetapkan terhadap jumlah seluruh dokumen kepegawaian yang diproses dalam periode tertentu.
- Formula :
$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen Kepegawaian yang Diproses}} \times 100\%$$
- Sumber Data : Bagian Perencanaan
- Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

18. Hasil Penilaian Kearsipan Perangkat Daerah

- Level dalam Resntra : Kinerja Operasional
- Definisi Oprasional : Hasil pengawasan dan penilaian Kearsipan Perangkat Daerah
- Formula : Hasil penilaian Tim Pengawas dan Penilai Kearsipan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

19. Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri

Level dalam Resntra : Kinerja Operasional

Definisi Oprasional : Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan secara internal oleh perangkat daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai di lingkungan instansinya sendiri

Formula : Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri yang Diselenggarakan Secara Internal

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

20. Jumlah Teknologi Informasi yang digunakan

Level dalam Resntra : Kinerja Operasional

Definisi Oprasional : Jumlah sistem, aplikasi, perangkat, atau infrastruktur teknologi informasi yang dimanfaatkan secara aktif oleh perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dan/atau internal organisasi

Formula : Jumlah Teknologi Informasi yang Digunakan (Sistem, Aplikasi, atau Perangkat TI yang Beroperasi Aktif)

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

21. Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Level dalam Resntra : Kinerja Operasional

Definisi Oprasional : Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa adalah jumlah orang atau peserta dari unsur masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembinaan, sosialisasi, pendidikan, atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menanamkan nilai-nilai Ideologi Pancasila, memperkuat

	wawasan kebangsaan, serta membangun karakter bangsa.
Formula	: Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan pada Setiap Kegiatan Pembinaan Ideologi dan Kebangsaan
Sumber Data	: Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

22. Jumlah Koordinasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Banyaknya kegiatan koordinasi yang dilakukan antara instansi pelaksana dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pembinaan dan penguatan nilai-nilai Pancasila serta Wawasan Kebangsaan
Formula	: Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan untuk pembinaan dan penguatan nilai-nilai Pancasila serta Wawasan Kebangsaan
Sumber Data	: Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Penanggung jawab	: Badan Kesatua Bangsa dan Politik

23. Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat

Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat, seperti sosialisasi, pembinaan, dan operasi gabungan
Formula	: Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat, seperti sosialisasi, pembinaan, dan operasi gabungan
Sumber Data	: Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Penanggung jawab : Badan Kesatua Bangsa dan Politik

24. Jumlah Koordinasi Ketahanan Ekososbud dan Agama

Level dalam Resntra : Kinerja Operasional

Definisi Oprasional : Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait bersama pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan

Formula : Jumlah kegiatan memperkuat ketahanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan

Sumber Data : Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Penanggung jawab : Badan Kesatua Bangsa dan Politik

25. Jumlah Berkas Persyaratan Pencairan Dana Hibah Partai Politik yang Sesuai dengan Regulasi

Level dalam Resntra : Kinerja Operasional

Definisi Oprasional : Jumlah dokumen yang harus diserahkan oleh partai politik untuk proses pencairan dana hibah, yang memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam regulasi atau peraturan yang berlaku

Formula : Jumlah Berkas Persyaratan Pencairan Dana Hibah Partai Politik

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Penanggung jawab : Badan Kesatua Bangsa dan Politik

26. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik

Level dalam Resntra : Kinerja Operasional

Definisi Oprasional : Jumlah kegiatan atau pertemuan resmi yang dilakukan oleh pihak terkait (misalnya, lembaga pemerintah, partai politik, atau organisasi masyarakat) untuk meningkatkan dan menyebarluaskan

	pemahaman serta pendidikan politik kepada masyarakat, sesuai dengan jadwal, standar, dan prosedur yang berlaku
Formula	: Jumlah kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait (misalnya, lembaga pemerintah, partai politik, atau organisasi masyarakat)
Sumber Data	: Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Penanggung jawab	: Badan Kesatua Bangsa dan Politik

27. Jumlah Ormas yang Mendaftar yang Sesuai dengan Regulasi

Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang telah mendaftar dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan yang diatur dalam regulasi yang berlaku untuk mendapatkan pengesahan atau legalitas dari instansi berwenang
Formula	: Jumlah Ormas yang Mendaftar yang Sesuai dengan Regulasi yang berlaku
Sumber Data	: Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Penanggung jawab	: Badan Kesatua Bangsa dan Politik

28. Jumlah Laporan Ormas

Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Jumlah Laporan Ormas adalah bahwa pengukuran ini berfungsi untuk secara sistematis menghitung dan mendata laporan resmi yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan kepada pihak berwenang dalam periode tertentu, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang tepat.
Formula	: Jumlah Laporan Ormas
Sumber Data	: Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Penanggung jawab : Badan Kesatua Bangsa dan Politik

29. Jumlah Data Konflik

Level dalam Resntra : Kinerja Operasional

Definisi Oprasional : Jumlah kejadian konflik yang tercatat dalam suatu sistem selama periode tertentu, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang efektif

Formula : Jumlah Data Konflik

Sumber Data : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Penanggung jawab : Badan Kesatua Bangsa dan Politik

30. Jumlah Dokumen Konflik

Level dalam Resntra : Kinerja Operasional

Definisi Oprasional : Jumlah dokumen resmi, laporan, atau catatan tertulis yang berkaitan dengan konflik yang terjadi, dokumen ini mencakup semua jenis dokumen yang telah diidentifikasi, didokumentasikan, dan diklasifikasikan secara sistematis sebagai bukti atau referensi terkait konflik yang terjadi, untuk keperluan analisis, pengawasan, dan pengambilan keputusan.

Formula : Jumlah dokumen resmi, laporan, atau catatan tertulis yang berkaitan dengan konflik yang terjadi

Sumber Data : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Penanggung jawab : Badan Kesatua Bangsa dan Politik

KEPALA BADAN,

GESPROJONI, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19691106 199603 1 002